

Bapenda Kobar Dorong Optimalisasi PAD melalui Sinergi Desa dan Kecamatan



MMC Kobar – Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan di Aula Kecamatan Kotawaringin Lama, Kamis (24/7/2025). Kegiatan ini menghadirkan Camat Kotawaringin Lama, Kepala UPT PPD Samsat Kobar, Kepala Bapenda Kobar, serta perwakilan dari desa-desa di wilayah tersebut.

Rapat ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa/kelurahan dalam mendukung pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Diharapkan, sinergi ini mampu memperluas basis pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah.

Camat Kotawaringin Lama, Yudha P. Kusuma, dalam sambutannya menekankan pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah.

“PAD yang kita kumpulkan akan kembali ke kecamatan dan desa dalam bentuk program pembangunan. Anggaran desa pun akan sangat dipengaruhi oleh capaian PAD,” ujarnya.

Senada dengan itu, **Kepala UPT PPD Samsat Kobar, M. Ali Sofwan Nur**, menyampaikan informasi terkait program-program unggulan yang sedang dijalankan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya kendaraan bermotor. Salah satu program yang tengah berlangsung adalah pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam rangka peringatan HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah.

“Program ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 25 Tahun 2025, dan berlaku sejak 23 Juni hingga 23 September 2025,” jelasnya.

Ali juga memaparkan berbagai jenis pajak yang dikelola oleh Bapenda Provinsi, antara lain PKB, BBNKB, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Ia menyebutkan bahwa target pendapatan dari PKB dan BBNKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 mencapai Rp700 miliar, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menggali potensi pendapatan daerah.

Sementara itu, **Kepala Bapenda Kobar, M. Nursyah Ikhsan**, memaparkan capaian PAD Kobar hingga bulan Juli 2025 yang telah mencapai 37,57% dari total target Rp433,357 miliar. Rinciannya meliputi:

- Pajak Daerah: Rp76,77 miliar
- Retribusi Daerah: Rp76,3 miliar
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD): Rp4 miliar
- Lain-lain PAD yang sah: Rp3,75 miliar

Dalam paparannya, Nursyah menekankan filosofi bahwa pajak merupakan wujud gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

“Sumber keuangan negara berasal dari pajak. Ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Pajak pusat, provinsi, dan kabupaten semuanya berperan penting,” tegasnya.

Ia juga mengimbau agar pemerintah desa dan kelurahan berperan aktif dalam mendata kendaraan bermotor di wilayah masing-masing, termasuk kendaraan berpelat nomor luar Kalimantan Tengah (non-KH) yang masih banyak ditemukan di Kobar.

“Pajak harus dipungut secara adil dan transparan. Kendaraan yang beroperasi di wilayah ini turut menyebabkan kerusakan jalan, sehingga sudah selayaknya memberikan kontribusi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Nursyah juga menyampaikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun ini mencapai Rp1,195 triliun. Oleh karena itu, desa-desa diimbau untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara realistis dan sesuai dengan potensi yang ada.

Sebagai bagian dari edukasi fiskal, Kepala Bapenda juga melakukan simulasi penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta menampilkan Zona Nilai Tanah (ZNT) per blok. Sesi ini disambut antusias oleh peserta, terutama dari perwakilan Desa Ipuh Bangun Jaya yang mengusulkan agar perhitungan BPHTB lebih mempertimbangkan aspek keadilan sosial.

“Di desa kami, ada lahan seluas 5 hektare yang dikenai Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp5 juta. Ini perlu diperhatikan agar masyarakat tidak terbebani,” ujar perwakilan desa tersebut.

Sementara itu, perwakilan Desa Palih Baru menanyakan secara spesifik rumus penghitungan BPHTB, menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman di tingkat desa terkait pajak daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa semakin memahami peran strategis mereka dalam mendukung optimalisasi PAD, serta terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan desa demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kotawaringin Barat.

Cerdas Pajak Bersama Sinpelaja

Lapor pajak sekarang bisa di Sentuh Pajak Kobar App lho, download sekarang di Google Play Store!